



PEMERINTAH KOTA PALU



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2016-2021**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu Tahun 2016-2021. Renstra ini merupakan penjabaran RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 ini memuat visi dan misi Bappeda tahun 2016-2021 dan uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2021. Di dalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat

Palu, Januari 2017

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu

Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19720414 199203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda	6
2.2 Sumber Daya Bappeda	22
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	31
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota	33
3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	49
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	51
4.1 Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51
4.2 Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	53

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda	53
4.4 Strategi dan Kebijakan Bappeda	56
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	60
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun.

Terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini Renstra OPD perlu disusun berdasarkan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra

OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan struktur organisasi Perangkat daerah dan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2016 tentang struktur organisasi perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palu.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Palu tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai arah kebijakan serta strategi pencapaian program kerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun. Dokumen Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja Bappeda) Sedangkan tujuan dari Renstra Bappeda Kota Palu tahun 2016-2021 ini adalah untuk :

1. Memudahkan seluruh unit Bappeda dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Bappeda secara terpadu, terarah dan terukur.
2. Menyediakan tolok ukur penilaian dan pencapaian kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk:

1. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021.
2. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Palu.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB VII PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB VIII GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB IX ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari:

- 1. gambaran pelayanan OPD;
- 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

BAB X VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi OPD
- 4.2 Misi OPD
- 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.4 Strategi dan Kebijakan OPD

BAB XI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB XII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Berdasarkan kondisi umum, Bappeda Kota Palu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Olehnya itu, Kualitas rencana pembangunan daerah harus lebih berkualitas dengan dengan melihat hal-hal penting dalam merencanakan pembangunan daerah, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
2. Adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
3. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta:
4. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensian tara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra Bappeda)

Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Kepala Badan**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu WaliKota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota.

- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sekretaris**

- (1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan pengoordinasian rumusan program kegiatan;
 - b. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. pengelolaan aset;
 - g. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

- Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, dan administrasi kepegawaian;
 - b. melakukan urusan surat-menyurat;
 - c. melaksanakan dokumentasi dan kearsipan;
 - d. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
 - e. mengelola informasi kepegawaian dan umum;
 - f. menyusun dan menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - g. menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
 - h. mengelola aset ;
 - i. mengelola urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan untuk mengikuti pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
 - j. menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
 - l. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan sub bagian kepegawaian dan umum; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja;

- d. melakukan pengelolaan data;
- e. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- f. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. menyusun dan mengoordinasikan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;
- h. menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- i. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan sub bagian perencanaan program dan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

➤ **Kepala Bidang Perencanaan**

- (1) Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi:
 - a. penyiapan rencana program dan kegiatan pada Bidang Perencanaan;
 - b. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran berkenaan;
 - d. penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD;
 - e. penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
 - f. penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah;
 - g. penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- h. pengoordinasian dan verifikasi penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah;
- i. pengoordinasian penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
- j. pelaksanaan fasilitasi Musrenbang kota; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perencanaan membawahi :

- Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan melaksanakan tugas, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan;
 - b. menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur dan lingkungan mencakup urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga;
 - c. menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan lingkungan skala kota;
 - d. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan lingkungan mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga;
 - e. mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rencana kerja OPD urusan infrastruktur dan lingkungan;

- f. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis OPD urusan infrastruktur dan lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan ;
 - h. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan;
 - i. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan melaksanakan tugas, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan ekonomi dan keuangan;
 - b. menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan keuangan mencakup urusan perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pendapatan, keuangan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penanaman modal dan perizinan, pertanian, kelautan, perikanan, ketahanan pangan, pengawasan, penelitian dan pengembangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur;
 - c. melakukan fasilitasi penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran berkenaan;
 - d. melakukan fasilitasi penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan;
 - e. memfasilitasi penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah;

- f. memfasilitasi penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang kota;
 - h. menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan skala kota;
 - i. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan mencakup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur;
 - j. mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rencana kerja OPD urusan ekonomi dan keuangan;
 - k. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis OPD urusan ekonomi dan keuangan;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan ekonomi dan keuangan;
 - m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota;
 - n. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan ekonomi dan keuangan;
 - o. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang perencanaan ekonomi dan keuangan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya melaksanakan tugas, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan sosial dan budaya;

- b. menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang sosial dan budaya mencakup urusan satuan Polisi Pamong Praja, kesatuan bangsa dan politik, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kependudukan dan pencatatan sipil, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan;
- c. mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rencana kerja OPD urusan sosial dan budaya;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis OPD urusan sosial dan budaya;
- e. menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya;
- f. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan sosial dan budaya;
- h. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan sosial dan budaya;
- i. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang perencanaan sosial dan budaya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

➤ **Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi**

- (1) Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi:
 - a. penyiapan rencana program dan kegiatan pada Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada skala kota;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
 - d. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja pemerintah daerah kota;
 - e. pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota;
 - f. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan skala kota; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi membawahi :

- Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Lingkungan melaksanakan tugas, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi infrastruktur dan lingkungan;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang infrastruktur dan lingkungan pada skala kota mencakup urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, penanggulangan

- bencana daerah, pemadam kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga;
- c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah urusan infrastruktur dan lingkungan mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga; ;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan infrastruktur dan lingkungan skala kota;
 - e. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi infrastruktur dan lingkungan;
 - f. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang monitoring dan evaluasi infrastruktur dan lingkungan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Ekonomi dan Keuangan melaksanakan tugas, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi ekonomi dan keuangan;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan pada skala kota mencakup urusan perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pendapatan, keuangan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penanaman

- modal dan perizinan, pertanian, kelautan, perikanan, ketahanan pangan, pengawasan, penelitian dan pengembangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur;
- c. melakukan penyusunan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja pemerintah daerah kota;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah urusan ekonomi dan keuangan mencakup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan ekonomi dan keuangan skala kota;
 - f. melakukan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota;
 - g. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi ekonomi dan keuangan;
 - h. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang monitoring dan evaluasi ekonomi dan keuangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Sosial dan Budaya melaksanakan tugas, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi sosial dan budaya;

- b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial dan budaya pada skala kota mencakup urusan satuan Polisi Pamong Praja, kesatuan bangsa dan politik, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kependudukan dan pencatatan sipil, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan;
- c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah urusan sosial dan budaya mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan sosial dan budaya skala kota;
- e. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi sosial dan budaya;
- f. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang monitoring dan evaluasi sosial dan budaya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

➤ **Kepala Bidang Data dan Informasi**

- (1) Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kepala Bidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi:
 - a. penyiapan rencana program dan kegiatan pada Bidang Data dan Informasi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah pada skala kota;
 - c. pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan;
 - d. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan skala kota;
 - e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Data dan Informasi membawahi :

- Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Infrastruktur dan Lingkungan melaksanakan tugas, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data dan informasi infrastruktur dan lingkungan;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah bidang infrastruktur dan lingkungan pada skala kota mencakup urusan urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran, komunikasi dan

- informatika, statistik, persandian, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga;
- c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan infrastruktur dan lingkungan mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan urusan infrastruktur dan lingkungan skala kota;
 - e. mengelola sistem informasi perencanaan pembangunan;
 - f. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data dan informasi infrastruktur dan lingkungan;
 - g. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang pengelolaan data dan informasi infrastruktur dan lingkungan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Ekonomi dan Keuangan melaksanakan tugas, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data dan informasi ekonomi dan keuangan;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan pada skala kota mencakup urusan perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pendapatan, keuangan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penanaman modal dan perizinan, pertanian, kelautan, perikanan, ketahanan pangan, pengawasan, penelitian dan

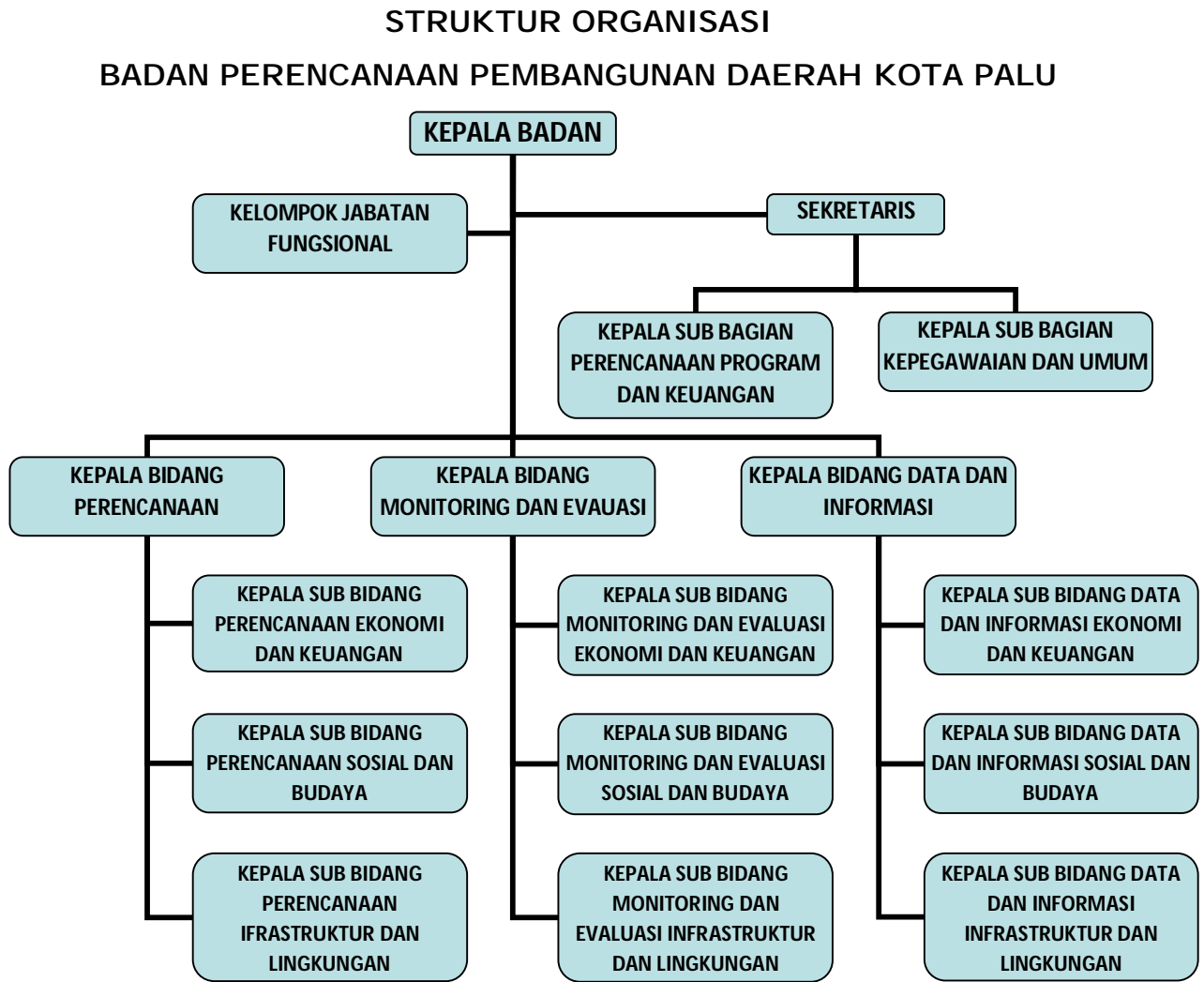
- pengembangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur;
- c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah urusan ekonomi dan keuangan mencakup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan urusan ekonomi dan keuangan skala kota;
 - e. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data dan informasi ekonomi dan keuangan;
 - f. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang pengelolaan data dan informasi ekonomi dan keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Sosial dan Budaya melaksanakan tugas, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data dan informasi sosial dan budaya;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah bidang sosial dan budaya pada skala kota mencakup urusan satuan Polisi Pamong Praja, kesatuan bangsa dan politik, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kependudukan dan pencatatan sipil, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat,

- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan;
- c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah urusan sosial dan budaya mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan;
 - d. mengelola pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan skala kota;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan urusan sosial dan budaya skala kota;
 - f. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data dan informasi sosial dan budaya;
 - g. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang pengelolaan data dan informasi sosial dan budaya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Struktur Organisasi Bappeda

Pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi Bappeda berada dalam ruang lingkup bagian masing-masing bidang yang termuat dalam struktur organisasi. Struktur organisasi Bappeda terdiri dari seorang Kepala Badan dan seorang Sekretaris dengan 3 (Tiga) Kepala Bidang, 9 (Sembilan) Kepala Sub Bidang dan 2(Dua) Kepala Sub

Bagian. Secara jelas struktur organisasi Bappeda Kota Palu adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Bappeda

Di bidang SDM Aparatur, Kondisi Kepegawaian di Lingkungan Bappeda Kota Palu posisi pegawai per Januari 2016 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Profil Sumberdaya Manusia Bappeda Kota Palu berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No.	Golongan	Pendidikan					Total
		S2	S1	DIII	SMA	SMP	
1	IV/c	1					1
2	IV/b						0
3	IV/a	3					3
Total Gol. IV		4	0	0	0	0	4
4	III/d	5	1				6
5	III/c		2				2
6	III/b	2	7		1		10
7	III/a		9				9
Total Gol. III		7	19	0	1	0	27
8	II/d						0
9	II/c			1	1		2
10	II/b				1		1
11	II/a				1		1
Total Gol. II		0	0	1	3	0	4
Total PNS		11	19	1	4	0	35
PHL			19	1	23		43
Total		11	38	2	27	0	78
		14%	49%	3%	35%	0%	100%

Data : Januari 2016

Meskipun pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang dalam berkinerja, namun mengingat tingkat pendidikan masih menjadi indeks kualitas dan keunggulan daya nalar SDM disebagian besar negara didunia, maka kondisi sebagaimana tersebut dalam tabel diatas perlu mendapat perhatian Bappeda dalam rangka menghadapi tantangan organisasi guna menyelenggarakan perceatan pencapaian visi organisisasi.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penanaman Modal Kota Palu Tahun 2013 - 2015

NO	INDIKATOR KERJA SESEUAI TUGAS DAN FUGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2013 (thn n-2)	Tahun 2014 (thn n-1)	Tahun 2015 (thn n)	Tahun 2016 (thn n+1)	Tahun 2013 (thn n-2)	Tahun 2014 (thn n-1)	Tahun 2015 (thn n)	Tahun 2016 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Tersedianya buku statistik	Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya		21%	27%	27%	20%	18%	22,66%			
	Terlaksananya Penyusunan dan Pengolahan data dan Sistem informasi Manajemen Perkotaan			-	-	-	20%	100%	-			
	Terselenggaranya Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas IPTEK			-	-	-	20%	97%	98%			
	Tersedianya dokumen Simrenas dan SIPD			29%	35%	36%	20%	34%	44,12%			
	Tersusunnya Profil Kepala Daerah Kota Palu			-	-	-	20%	100%	-			
	Terlaksananya Verifikasi data Berbasis Pemulihan Komunitas Tahap II Bagi Korban HAM Peristiwa			-	-	-	20%	-	-			
	Terselenggaranya Penegakan HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kota Palu			-	-	-	20%	-	-			
	Tersusunnya Buku Kebijakan dan Gagasan Walikota Palu Menyambut 70 Tahun Kemerdekaan Indonesia			-	-	-	20%	-	-			
	Tersusunnya Indikator Pembangunan Kota palu 2015-2020			-	-	-	20%	93%	-			
2	Terlaksananya Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan konsultasi dan koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 dan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan		24%	29%	34%	20%	7%	7%			
	Terselenggaranya Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah						20%	22%	9%			
	Adanya dokumen KUA dan PPAS			21%	22%	26%	20%	18%	50%			
3	Tersedianya Dokumen RENJA SKPD	Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Perubahan RKP 2014 dan RKP 2015) dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Perubahan Renja SKPD 2014 dan Renja SKPD 2015) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri		24%	29%	29%	20%	19%	7%			
	Terlaksananya musrenbang RKP						20%	-	-			
	Tersusunnya Dokumen Rancangan RKP						20%	19%	48%			
	Tersusunnya Dokumen RKP 2016						20%	19%	-			
	tersedianya dokumen rancangan RPJMD kota palu			-	-	62%	20%	-	55%			
	Terselenggaranya musrenbang RPJMD			-	-	-	20%	-	-			
4	Terselenggaranya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah		24%	29%	34%	20%	29%	31%			
5	Terselenggaranya Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal		-	-	-	20%	97%	100%			
	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang PM Dan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha			-	-	-	20%	99%	-			

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kota Palu

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan jasa surat menyurat	54.470.000	255.300.000	337.950.000	2.460.000	3.348.000	49.763.000	246.800.000	336.150.000	2.460.000	2.201.400	91,36%	96,67%	99,47%	100,00%	65,75%	(10.224.400)	(9.512.320)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79.800.000	88.815.202	86.400.000	80.340.000	106.200.000	52.716.777	81.583.031	66.976.681	70.307.332	55.464.807	66,06%	91,86%	77,52%	87,51%	52,23%	5.280.000	549.606
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	61.776.000	77.764.400	69.081.500	235.301.500	301.082.400	46.662.220	54.467.150	66.280.250	234.616.700	178.624.200	75,53%	70,04%	95,95%	99,71%	59,33%	47.861.280	26.392.396
Penyediaan jasa administrasi keuangan			211.096.725	934.385.550	444.660.000			209.228.650	932.075.599	222.555.000			99,12%	99,75%	50,05%	88.932.000	44.511.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.368.850	13.619.360	6.822.686	6.825.016	7.028.710	6.027.875	12.345.744	4.886.246	6.822.600	5.355.760	72,03%	90,65%	71,62%	99,96%	76,20%	(268.028)	(134.423)
Penyediaan alat tulis kantor	6.545.530	82.225.994	57.814.875	62.707.200	75.052.040	5.111.900	75.738.982	57.814.875	62.707.200	73.621.040	78,10%	92,11%	100,00%	100,00%	98,09%	13.701.302	13.701.828
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	6.145.300	14.756.860	15.132.304	15.775.550	38.110.250	3.758.750	11.701.860	14.132.304	14.775.450	27.693.481	61,16%	79,30%	93,39%	93,66%	72,67%	6.392.990	4.786.946
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.416.650	5.412.000	3.813.750	6.640.000	5.398.000	1.235.850	5.028.250	3.788.750	6.640.000	3.528.500	51,14%	92,91%	99,34%	100,00%	65,37%	596.270	458.530
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				106.180.170	237.038.000				106.070.250	154.992.000				99,90%	65,39%	65.428.915	24.460.875
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	27.000.000	37.900.001	4.720.000	7.100.000	4.860.000	8.415.000	3.845.000	3.770.000	2.435.000	48,60%	31,17%	10,15%	79,87%	34,30%	(580.000)	(485.000)
Penyediaan makanan dan minuman	43.175.000	75.130.000	62.400.000	2.625.000	21.870.000	39.600.000	75.130.000	61.800.000	2.625.000	7.290.000	91,72%	100,00%	99,04%	100,00%	33,33%	(4.261.000)	(6.462.000)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	430.293.900	305.832.700	327.881.500	106.447.300	947.276.000	384.228.500	296.956.934	306.738.900	103.027.300	755.396.404	89,29%	97,10%	93,55%	96,79%	79,74%	103.396.420	74.233.581
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	19.460.000					19.460.000					100,00%					19.460.000	19.460.000
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional				511.300.000					510.900.000					99,92%		511.300.000	510.900.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		415.261.400	491.470.000				410.557.700	488.469.998				98,87%	99,39%			38.104.300	38.956.149
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9.900.000			16.294.364		9.400.000			9.082.427		94,95%			55,74%		3.197.182	(158.787)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		10.150.000	10.075.000	13.500.000	17.250.000		9.900.000	9.855.000	13.500.000	12.865.500		97,54%	97,82%	100,00%	74,58%	1.775.000	741.375
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		44.000.000	74.930.000				43.980.000	74.930.000				99,95%	100,00%			15.465.000	15.475.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		34.162.500	27.500.000	16.200.000			34.162.500	27.500.000	16.200.000		100,00%	100,00%	100,00%			(5.987.500)	(5.987.500)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				35.000.000					-					0,00%		35.000.000	-
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	42.000.000	99.000.000	86.320.500	126.658.900		41.888.100	99.000.000	83.128.500	126.658.898		99,73%	100,00%	96,30%	100,00%		21.164.725	21.192.700
Pelatihan Aparatur Perencana Pembangunan Dilingkungan Pemerintah Kota Palu			143.160.102					61.883.620					43,23%			143.160.102	61.883.620
Rencana Tindak TASK FORCE Percepatan Pembangunan Kota Palu																	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP BAPPEDA)	81.240.000	133.057.400	113.527.200	72.717.250	8.355.000	75.773.435	129.057.400	113.527.200	66.737.500	8.355.000	93,27%	96,99%	100,00%	91,78%	100,00%	(14.577.000)	(13.483.687)
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	40.421.750	87.866.000				40.220.900	81.830.000				99,50%	93,13%				23.722.125	20.804.550
Program Pengembangan Data/Informasi																	
Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	413.500.000	84.187.350				383.102.500	83.937.200				92,65%	99,70%				(164.656.325)	(149.582.650)
Penyusunan Profil Daerah Kota Palu			133.049.000					133.049.000					100,00%			133.049.000	133.049.000
Penyusunan Profil Kepala Daerah Kota Palu				124.950.000	143.230.000				-	143.230.000				0,00%	100,00%	9.140.000	71.615.000
Penelitian Di Bidang Pengembangan Ekonomi Produk Unggulan Rotan (Lanjutan)			232.378.400	118.806.000				229.382.400	117.189.400				98,71%	98,64%		(56.786.200)	(56.096.500)
Penyusunan Data Statistik Kota Palu		338.643.520	310.699.500	387.730.000	151.722.500		338.429.120	310.649.800	380.872.500	144.380.000		99,94%	99,98%	98,23%	95,16%	(46.730.255)	(48.512.280)
Penelitian Di Bidang Perindustrian			70.993.210					67.838.578								70.993.210	67.838.578
Penelitian Distribusi Pendapatan Masyarakat Kota Palu			118.170.100					118.170.100						100,00%		118.170.100	118.170.100
Penelitian Studi Pola Parkir				61.400.000					61.400.000					100,00%		61.400.000	61.400.000
Studi Kepuasan pada Pelayanan Kinerja Pemerintahan Kota Palu			97.296.000					95.172.125						97,82%		97.296.000	95.172.125
Penyusunan dan Pengolahan data dan Sistem Informasi Profil Daerah Kota Palu			116.255.000					116.254.800						100,00%		116.255.000	116.254.800
Penyusunan dan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Manajemen Perkotaan Kota Palu		129.070.000	195.773.860	298.931.100	36.156.100		120.795.900	195.773.860	298.849.680	20.774.000		93,59%	100,00%	99,97%	57,46%	(23.228.475)	(25.005.475)
Penyusunan Dan Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu				152.228.900	108.951.400				152.228.900	67.341.400				100,00%	61,81%	(21.638.750)	(42.443.750)
Survey data potensi Pariwisata Daerah Kota Palu			249.325.000					236.398.000						94,82%		249.325.000	236.398.000
Pemanfaatan Limbah ternak sapi sebagai bahan baku biogas sebagai alternatif energi pengganti minyak tanah			65.591.488					65.591.488						100,00%		65.591.488	65.591.488
Peningkatan & Pengembangan Kapasitas IPTEK				86.944.000	41.637.600				84.840.900	-				97,58%	0,00%	(22.653.200)	(42.420.450)
Verifikasi Data Berbasis Pemulihan Komunitas Tahap II Bagi Korban HAM Peristiwa 1965/1966					141.023.900					132.557.700					94,00%	141.023.900	132.557.700
Penegakan HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kota Palu					135.733.500					58.759.600					43,29%	135.733.500	58.759.600
Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Kota Palu Dalam Pemenuhan HAM Bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya Terhadap Keluarga Eks Pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI)				89.225.000					88.775.000					99,50%		89.225.000	88.775.000
Penyusunan Buku Kebijakan dan Gagasan Walikota Palu Menyambut 70 Tahun Kemerdekaan Indonesia					105.550.000					105.550.000					100,00%	105.550.000	105.550.000
Optimalisasi Retribusi Pasar dan Parkir Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu				96.985.000					96.485.000					99,48%		96.985.000	96.485.000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kajian Potensi, Pemetaan Sumber Daya Ikan dan Non Ikan Serta Kondisi Perairan Teluk Palu Kota Palu				322.175.000					302.851.100					94,00%		322.175.000	302.851.100
Penguatan Forum Layanan Iptek Masyarakat				71.925.400					71.287.300					99,11%		71.925.400	71.287.300
Kajian dibidang Pemerintahan di Kota Palu		94.569.000					93.628.800					99,01%				94.569.000	93.628.800
Penelitian Bidang Ekonomi Kota Palu	80.603.000	110.246.000				79.998.980	108.629.000				99,25%	98,53%				14.821.500	14.315.010
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah		32.405.200					32.405.200					100,00%				32.405.200	32.405.200
Penelitian Peningkatan produk Unggulan Ekonomi Kota Palu		149.111.000					148.886.000					99,85%				149.111.000	148.886.000
penelitian dan pengembangan potensi kota palu	74.097.000					70.229.425					94,78%					74.097.000	70.229.425
Program Kerjasama Pembangunan																	
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	151.723.300		285.000			151.646.200		285.000			99,95%		100,00%			(75.719.150)	(75.680.600)
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah			312.300.000					312.300.000					100,00%			312.300.000	312.300.000
Forum Investasi Kawasan Timur Indonesia	384.450.000					218.115.000					56,73%					384.450.000	218.115.000
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh																	
Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh			191.381.500	203.714.000	119.195.000			177.938.600	181.824.100	69.192.200			92,98%	89,25%	58,05%	(24.062.167)	(36.248.800)
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1.421.804.000	382.890.000	267.115.000			1.419.079.433	373.548.000	260.780.000			99,81%	97,56%	97,63%			(384.896.333)	(386.099.811)
Forum Investasi Kawasan Timur Indonesia		287.478.662					260.946.500					90,77%				287.478.662	260.946.500
Kawasan Pembangunan ekonomi terpadu	169.400.000					106.427.000					62,83%					169.400.000	106.427.000
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar																	
Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan		248.785.000	178.935.000	267.075.000	172.337.500		234.548.000	178.721.000	261.666.077	82.175.000	94,28%	99,88%	97,97%	47,68%		(19.111.875)	(38.093.250)
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan (Subid. Kesra)			262.220.000						261.869.940				99,87%			262.220.000	261.869.940
Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial			20.678.700					20.678.700					100,00%			20.678.700	20.678.700
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi			93.255.000					54.267.800					58,19%			93.255.000	54.267.800
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri		77.797.400					77.797.400				100,00%					77.797.400	77.797.400
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan			225.268.000	120.715.000	78.105.000			178.327.300	113.214.300	36.826.653			79,16%	93,79%	47,15%	(49.054.333)	(47.166.882)
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan			265.475.904	72.812.500				204.807.600	28.650.000				77,15%	39,35%		(96.331.702)	(88.078.800)
Koordinasi perencanaan ruang terbuka hijau		43.140.000	959.774.599				42.584.645	877.160.600				98,71%	91,39%			458.317.300	417.287.978
Koordinasi Perencanaan Program Kota Hijau			462.836.496	114.476.000				452.118.896	25.860.000				97,68%	22,59%		(174.180.248)	(213.129.448)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah																		
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	105.330.000	135.693.750				104.639.175	113.572.500				99,34%	83,70%				15.181.875	4.466.663	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah																		
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	328.100.000	273.805.825	348.666.000	220.772.000		316.025.400	273.305.650	346.166.000	220.122.000		96,32%	99,82%	99,28%	99,71%		(26.832.000)	(23.975.850)	
Penyusunan rancangan RPJPD	177.503.250					139.390.250					78,53%					177.503.250	139.390.250	
Penyusunan Rancangan RPJMD	398.873.000					367.498.500					92,13%				13.89%	(23.039.000)	(159.247.850)	
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD						169.905.000					-				0,00%	169.905.000	-	
Penyusunan rancangan RKPD		52.830.000	108.412.000	204.055.000		74.902.000	51.130.000	108.412.000	202.950.000		52,852.000	96,78%	100,00%	99,46%	70,56%	5.518.000	430.500	
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		130.660.000				263.975.000	130.660.000				257.975.000	100,00%			97,73%	66.657.500	63.657.500	
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			250.660.900	126.998.200				222.530.600	125.458.740				88,78%	98,79%		(61.831.350)	(48.535.930)	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	119.107.400	105.525.000	356.542.300	321.532.000	487.875.500	110.357.400	100.305.900	302.591.900	319.064.900	64.605.800	92,65%	95,05%	84,87%	99,23%	13,24%	73.753.620	(9.150.320)	
Penyusunan RKUA Dan PPAS	114.196.000	119.265.000	133.057.500	393.184.000	120.998.000	114.016.900	119.214.800	132.915.700	374.664.300	1.732.000	99,84%	99,96%	99,89%	95,29%	1,43%	1.360.400	(22.456.980)	
Penyusunan Dokumen Renja SKPD				31.601.500	11.645.000					29.047.000					91,92%	100,00%	(9.978.250)	(8.701.000)
Penyusunan rencana strategi SKPD		81.552.500						81.552.500				100,00%				81.552.500	81.552.500	
Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90.470.550	127.610.000	82.168.000	73.201.400	141.743.400	81.805.550	97.518.400	73.916.000	73.166.300	73.186.400	90,42%	76,42%	89,96%	99,95%	51,63%	10.254.570	(1.723.830)	
Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah				89.836.400	147.732.655				89.834.500	128.242.500				100,00%	86,81%	28.948.128	19.204.000	
Pedoman penyusunan Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis RKPD dan Renja Kota Palu Kota Palu			78.970.000					78.970.000					100,00%			78.970.000	78.970.000	
Penyusunan Background Study RPMD Kota Palu				373.737.000					358.495.400					95,92%		373.737.000	358.495.400	
Penyusunan Indikator Pembangunan Kota Palu Tahun 2015-2020					100.250.000										0,00%	100.250.000	-	
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan Daerah					108.703.000					72.086.000					66,31%	108.703.000	72.086.000	
Koordinasi teknis perencanaan pembangunan bidang fispra		81.855.000					81.855.000					100,00%				81.855.000	81.855.000	
Penelitian Program Kawasan Kota Hijau		96.151.000					84.726.000					88,12%				96.151.000	84.726.000	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi																		
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah			11.366.200					11.366.200					100,00%			11.366.200	11.366.200	
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah			152.205.600					134.328.200					88,25%			152.205.600	134.328.200	
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat		62.389.000					62.389.000					100,00%				62.389.000	62.389.000	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		105.334.000					103.722.000					98,47%				105.334.000	103.722.000	
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan					426.175.000										0,00%	426.175.000	-	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			225.102.700					224.619.400					99,79%			225.102.700	224.619.400	
Program Perencanaan Sosial dan Budaya																		
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	206.869.600	161.150.000		224.102.400	316.001.500	193.940.227	137.777.600		214.052.400		93,75%	85,50%		95,52%	0,00%	27.282.975	(48.485.057)	
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu			123.142.000		589.146.500			108.993.000		449.879.600			88,51%		76,36%	233.002.250	170.443.300	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi Kerjasama Penanggulangan Kemiskinan					247.562.500					90.495.800					36,55%	247.562.500	90.495.800
Penanggulangan Kemiskinan Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palu			183.705.000		113.703.000			163.167.600		-			88,82%		0,00%	(35.001.000)	(81.583.800)
Koordinasi Perencanaan Permasalahan Pemerintahan Daerah	261.399.963	151.424.500	99.459.000	137.125.000	14.600.000	248.792.413	143.973.500	98.664.000	131.741.800	4.175.000	95,18%	95,08%	99,20%	96,07%	28,60%	(49.359.993)	(48.923.483)
Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah Kota Palu				163.307.500					160.808.560					98,47%		163.307.500	160.808.560
Penanggulangan kemiskinan penyusunan dokumen review SPKD dan PJM Pronangkis Kota Palu			132.653.000					125.011.000					94,24%			132.653.000	125.011.000
Penanggulangan Kemiskinan " Palu 2015 : Zero Poverty"			100.879.100					100.879.100					100,00%			100.879.100	100.879.100
Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung					1.050.537.500					393.364.000					37,44%	1.050.537.500	393.364.000
Peningkatan pencapaian Target MDGs				108.743.000					104.669.700					96,25%		108.743.000	104.669.700
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																	
Pengembangan potensi unggulan daerah	82.735.206	62.810.000	171.325.000	151.700.000	124.900.000	62.201.600	36.160.000	166.167.200	151.242.000	81.026.136	75,18%	57,57%	96,99%	99,70%	64,87%	8.432.959	3.764.907
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	50.922.450	33.450.000	56.977.000			49.202.450	26.497.600	56.371.000			96,62%	79,22%	98,94%			2.018.183	2.389.517
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	182.058.099	98.815.000	92.181.000		123.225.000	62.451.500	89.676.000	89.960.900		107.021.375	34,30%	90,75%	97,59%		86,85%	(14.708.275)	11.142.469
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi			103.327.200					97.926.700					94,77%			103.327.200	97.926.700
Penyelenggaraan Pameran Investasi		92.760.000					92.141.000					99,33%				92.760.000	92.141.000
Sosialisasi Tentang Informasi Peningkatan Promosi dan Investasi di Kota Palu			77.925.000					73.625.000					94,48%			77.925.000	73.625.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal				248.050.000					242.799.400					97,88%		248.050.000	242.799.400
Koordinasi Antar Lembaga Dan Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/PMDN			33.685.000						32.460.000					96,36%		33.685.000	32.460.000
Sosialisasi Peraturan Dan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal				94.200.000					94.200.000				100,00%			94.200.000	94.200.000
Penyusunan Kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	37.884.245					25.095.000					66,24%					37.884.245	25.095.000
		5.720.757.531	8.797.270.012	8.838.500.016	8.627.074.975		5.418.967.774	8.281.988.837	8.398.301.765	4.262.964.291							

Dari hasil matriks di atas interpretasi dari Tabel 2.1 adalah sebagai berikut:

- **Pelayanan target telah tercapai.**

Dalam target pencapaian pelayanan OPD yang termuat dalam Target SPM, target Renstra serta realisasi pencapaiannya hanya memuat 3 target indikator kinerja yang telah tercapai

- **Faktor mempengaruhi keberhasilan pelayanan.**

Dari 3 indikator kinerja tersebut diatas ada beberapa faktor yang mendasar menjadikan realisasi anggaran dapat terpenuhi, dimana faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- ❖ indikator kinerja sama dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan sehingga indikator tersebut dapat di realisasikan;
- ❖ Antara kegiatan dengan indikator kinerja sesuai dengan target Renstra

- **Pelayanan target belum tercapai**

Terlaksananya Verifikasi data Berbasis Pemulihan Komunitas Tahap II Bagi Korban HAM Peristiwa 1965/1966
Terselenggaranya Penegakan HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kota Palu
Tersusunnya Buku Kebijakan dan Gagasan Walikota Palu Menyambut 70 Tahun Kemerdekaan Indonesia

Tiga kegiatan yang termuat dalam tabel diatas merupakan kegiatan yang menjadi kebijakan pimpinan, sehingga kalau di lihat dari segi capaian serta realisasi telah terlaksana, akan tetapi kegiatan tersebut hanya termuat dalam tahun terakhir, dan tidak termuat dalam dokumen Renstra Bappeda sehingga dapat di kategorikan sebagai target yang belum tercapai. Di karenakan kegiatan tersebut diatas termuat dalam pelaksanaan APBD T.A 2015.

- **Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan**

1. Terdapat perbedaan indikator kegiatan;
2. Pemuatan beberapa kegiatan dalam Renstra OPD belum sesuai dengan kerangka pendanaan dalam APBD;
3. indikator dan target kegiatan memiliki indikator dan target yang sama sehingga memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi.

Dari hasil matriks di atas interpretasi dari Tabel 2.2 adalah sebagai berikut:

Rasio antara realisasi dan anggaran dikatakan baik :

Peningkatan alokasi anggaran berbanding lurus dengan serapan anggarannya, dimana penyerapan anggaran dari tahun 2011 – 2014 memperlihatkan trend yang meningkat tiap tahunnya. Berbanding lurus serapan anggaran di karenakan dalam melaksanakan merencanakan kegiatan telah di sesuaikan dengan dokumen perencanaan. Sehingga dalam penyusunan anggran atau Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Bappeda konsisten dengan rencana kerja yang telah di susun dan sejalan dengan indikator kinerja serta target capaian dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Rasio antara realisasi dan anggaran dikatakan kurang baik :

Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggung jawabkan.

Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, manjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada

Bappeda Kota Palu. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Palu.

Tantangan :

1. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan
2. Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa dan kecamatan)
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran
4. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan OPD lain
5. Rendahnya pemahaman dan animo OPD dalam memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan

Peluang :

1. Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan
2. Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur Bappeda lebih efektif dan efisien
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda
4. Tuntutan stakeholders akan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan dan partisipatif
5. Kepercayaan Kepala Daerah kepada Bappeda sebagai lembaga teknis yang melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan
6. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Palu dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut

1. Masih belum sinkronnya perencanaan teknokratik dengan perencanaan hasil aspirasi masyarakat
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan perencanaan musrenbang
3. Kurang terakomodirnya hasil usulan masyarakat dalam musrenbang
4. Belum tersedianya basis data yang valid untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan
5. Kurangnya pemahaman dalam sinkronisasi perencanaan OPD dengan dokumen RPJMD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Palu Tahun 2016-2021, yaitu:

***“PALU KOTA JASA BERBUDAYA DAN BERADAT
DILANDASI IMAN DAN TAQWA”***

Penjelasan visi Kota Palu Tahun 2016 - 2021 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kata kunci	Penjelasan
PALU	Kota Tiga Dimensi (teluk, sungai, dan bukit /gunung) yang memiliki keunggulan komparatif dihuni oleh beberapa etnis, dimana suku kaili sebagai etnis lokal yang memiliki karakteristik budaya beragam dan unik, serta dapat berdampingan dengan budaya lainnya yang memungkinkan Palu menjadi Kota Destinasi.
KOTA JASA	Kota yang unggul dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, infrastuktur, kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui penciptaan kelurahan inovasi unggul dan mandiri berbasis Iptek bagi kemandirian ekonomi kerakyatan
BERBUDAYA DAN BERADAT	Budaya dalam Konteks Seni tradisional, Adat istiadat, dan Nilai (Toleransi, Kekeluargaan, Gotong Royong)
IMAN dan TAQWA	Mendorong kehidupan sosial kemasyarakatan yang berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa

Penelaahan terhadap visi kepala daerah menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan dalam pengertiannya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Perumusan Penjelasan Visi

No	Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
1	PALU	Geografi dan Demografi serta Karakter / Ciri-ciri Perkotaan	Kota Tiga Dimensi (teluk, sungai, dan bukit /gunung) yang memiliki keunggulan komparatif dihuni oleh beberapa etnis, dimana suku kaili sebagai etnis lokal yang memiliki karakteristik budaya beragam dan unik, serta dapat berdampingan dengan budaya lainnya yang memungkinkan Palu menjadi Kota Destinasi
2	KOTA JASA	Pembangunan Eonomi Mikro Berorientasi Home Industri	<p>Kota yang unggul dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, infrastuktur, kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui penciptaan kelurahan inovasi unggul dan mandiri berbasis lptek bagi kemandirian ekonomi kerakyatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator capaian Palu Kota Jasa dapat ditandai dengan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi masyarakat yang mencerminkan meningkatnya layanan pemerintah kepada masyarakat. 2. Meningkatnya daya beli masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya perekonomian masyarakat khususnya pembagunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada industri mikro.
3	BERBUDAYA dan BERADAT	Nilai – Nilai Karakter Kebangsaan	<p>Budaya dalam Konteks Seni tradisional, Adat istiadat, dan Nilai (Toleransi, Kekeluargaan, Gotong Royong).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator capaian berbudaya dan beradat dalam visi ini tercermin dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelestarian nilai budaya dan adat yang tercermin dari tumbuhnya pagelaran seni, budaya tradisional dan adat istiadat

No	Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
			dalam tatanan kehidupan masyarakat . 2. Menurunnya konflik sosial di Kota Palu yang mencerminkan meningkatnya nilai-nilai toleransi dan gotong royong di masyarakat
4	IMAN dan TAQWA	Nilai-Nilai Religius	Mendorong kehidupan sosial kemasyarakatan yang berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa • Indikator beriman dan bertaqwa sebagai landasan pembangunan Kota Palu adalah : 1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang dicerminkan dari meningkatnya kerukunan umat beragama meliputi kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. 2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing

Penjelasan visi diatas, telah ditetapkan pula misi yang akan diemban baik oleh pemerintah maupun segenap komponen masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Olehnya dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka visi di atas dijabarkan kedalam 6 (enam) Misi sebagai berikut:

Misi Pembangunan Kota Palu :

1. Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT ;
2. Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumberdaya Manusia berlandaskan Iman dan Taqwa;
3. Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan;
4. Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya;
5. Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya;
6. Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa.

Misi yang diemban untuk mencapai visi dikelompokkan ke dalam 6 pilar pembangunan yaitu Pilar (1) Sistem Informasi (2) Sumberdaya manusia, (3) Ekonomi Mandiri, (4) Good govenrnace, (5) Infrastruktur (6) Adat dan budaya, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

Misi Pertama Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT

Misi kesatu pada kalimat" Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT", pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar sistem informasi dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh kota palu, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Potensi sumberdaya yang dimiliki Kota Palu yang tersebar ke 8 kecamatan akan menjadikan keunggulan kompetitif manakala pemerintah mampu mengelola sumberdaya dengan efektif dan efsisien. Pada era informasi teknologi saat ini, peran sebuah sistem informasi dalam pengelolaan sumberdaya daerah sangatlah penting, hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan kepala daerah yang diperhadapkan pada banyaknya sumberdaya yang dimiliki.

Keberadaan sistem informasi potensi daerah berbasis IT diharapkan akan memberikan gambaran potensi sumberdaya manusia, alam, sosial, budaya, sarana dan prasarana, keuangan, dan serta ekonomi yang dimiliki Kota Palu. ketersediaan informasi yang akurat mempermudah seluruh perangkat daerah dalam menetapkan kebijakan dan program berdasarkan permasalahan dan isu strategis spasial perwilayahan Kota Palu, sehingga penetapan sasaran dan target pembangunan akan lebih efektif pelaksanaan dan efisien dalam penganggarannya. Sasaran pokok dalam misi ini adalah pemerintah Kota Palu memiliki Pusat Data dan Informasi Berbasis *Geografy Information System* (GIS) Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai misi pertama maka pemerintah Kota Palu akan untuk mengfokuskan sasaran berdasarkan penjabaran **Sub Misi** pertama sebagai berikut :

- 1 Penciptaan Sistem Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS;
- 2 Survey Potensi Sumberdaya Kota Palu;
- 3 Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu pada OPD dan Kelurahan.

Misi Kedua Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumberdaya Manusia berlandaskan Iman dan Taqwa

Upaya pemerintah Kota Palu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi untu bersaing dengan daerah lain. Dalam misi kedua langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dilakukan dalam tiga aspek penting, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan penguatan agama.

Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan penguatan agama bagi sumberdaya manusia dapat diperoleh manakala pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta kebijakan yang mendukung kemudahan

masyarakat untuk mengakses ketiga hal tersebut. Penyediaan layanan pendidikan, kesehatan berkualitas, mudah dan terjangkau merupakan langkah strategis yang harus di tempuh oleh pemerintah Kota Palu Saat ini. Penguatan agama bagi seluruh masyarakat perlu menjadi bagian tanggung jawab moral pemerintah daerah melalui kebijakan yang mengarahkan masyarakat untuk dapat lebih banyak mempelajari agama di pendidikan formal maupun non formal.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai misi kedua maka pemerintah Kota Palu akan untuk memfokuskan sasaran berdasarkan penjabaran **Sub Misi** kedua sebagai berikut :

- 1 Pendidikan terjangkau dan berkualitas;
- 2 Pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas;
- 3 Penguatan karakter kebangsaan melalui pendidikan Agama dan Budaya;
- 4 Meningkatkan dan mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan berbasis potensi sumberdaya lokal.

Misi Ketiga Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan.

Semangat yang kuat untuk meningkatkan kekatnyasejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya tercermin dalam misi ketiga pembangunan jangka menengah ini.

Orientasi pengembangan ekonomi di landaskan pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Pemerintah saat ini lebih memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang diciptakan dari pertumbuhan usaha kecil atau usaha mikro dan kecil di tiap perwilayah terkecil dalam hal ini keluarahan. Pemerintah Kota Palu berkeinginan untuk mengembangkan wilayah terkecil dari pemerintah kota

yaitu kelurahan menjadi basis awal perkembangan ekonomi kerakyatan. Kelurahan yang memiliki inovasi tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan serta dapat mengembangkan ekonomi masyarakat yang didukung oleh informasi dan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai misi ketiga maka pemerintah Kota Palu akan untuk memfokuskan sasaran berdasarkan penjabaran **Sub Misi** kedua sebagai berikut :

- 1 Peningkatan ketrampilan usaha melalui pemagangan, pendidikan dan pelatihan;
- 2 Peningkatan dan pengembangan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis home industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 3 Mendorong dan meningkatkan ekonomi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan;
- 4 Mendorong investasi berbasis potensi sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi Keempat Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu yang Efisien dan Efektif Berbasis Budaya

Misi keempat pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar tatakelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Kalimat rasionalisasi birokrasi yang efisien dan efektif berbasis budaya merupakan gambaran upaya untuk melakukan reformasi birokrasi yang mencakup penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien, disamping juga melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dimana pelaksanaannya berlandaskan pada budaya yang ada di Kota Palu.

Reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Palu perlu

dimulai dengan penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai (rekrutmen), , peningkatan koordinasi pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme, sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, serta penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, disamping pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi serta pengawasan Aparatur yang difokuskan pada kejelasan fungsi regulator dan operator melalui penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), baik di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan serta kemudahan pengurusan perizinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Upaya pencapaian misi ke empat, pemerintah daerah menyusun turunan misi ke dalam **Sub Misi** keempat sebagai berikut :

- 1 Penataan dan Rasionalisasi Kelembagaan;
- 2 Penataan dan Rasionalisasi Tata Laksana;
- 3 Penataan dan Rasionalisasi Sumberdaya Birokrasi;
- 4 Penataan dan Rasionalisasi Program, kegiatan dan anggaran;

Misi Kelima Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota Berbasis Wisata Budaya.

Misi kelima mengfokuskan pada upaya pemerintah untuk memberikan layanan pembangunan fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui penyediaan infrastruktur layanan bagi masyarakat. Permasalahan transportasi, kurangnya ruang-ruang publik, permasalahan kebersihan kota, tataruang yang kurang mendukung destinasi wisata serta beberapa masalah lingkungan merupakan permasalahan daerah yang menjadi isu lingkungan, dan perlu di carikan jalan keluar. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kota Palu melalui Misi kelima berupaya untuk menciptakan

lingkungan yang sehat, aman, dan menyenangkan melalui penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur akan berorientasi pada budaya atau untuk meningkatkan identitas budaya kota Palu yang akhirnya akan mendukung pariwisata.

Upaya pencapaian misi kelima, pemerintah daerah menyusun turunan misi ke dalam **Sub Misi** sebagai berikut :

- 1 Peningkatan dan pengembangan pelayanan transportasi Kota;
- 2 Peningkatan dan pengembangan dekorasi Kota berbasis budaya;
- 3 Penataan dan Peningkatan fungsi ruang-ruang publik Kota berbasis budaya;
- 4 Penataan manajemen kebersihan dan keindahan Kota berbasis budaya;
- 5 Pembangunan dan pengembangan pusat-pusat wisata berbasis budaya;
- 6 Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan.

Misi Keenam Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa

Misi keenam, pada hakikatnya juga merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar iman dan taqwa yang akan difokuskan pada peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan beradab bagi warga kota, peningkatan kualitas masyarakat yang disiplin, ramah, toleransi harmonis dalam kemajemukan, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara Kota Palu sebagai kota berbudaya dan beradab yang dilandasi oleh iman dan taqwa.

Upaya pencapaian misi ke Enam, pemerintah daerah menyusun turunan misi ke dalam **Sub Misi** sebagai berikut :

- 1 Pembinaan, Penguatan dan Pengembangan Peran Lembaga Agama dan Lembaga Adat dalam tata kehidupan sosial;
- 2 Pengembangan dan peningkatan nilai-nilai kearifan lokal;
- 3 Penguatan dan Pengembangan lembaga Seni budaya.

Berdasarkan uraian penjelasan misi pembangunan daerah Kota Palu lima tahun kedepan, maka dapat dilihat rumusan penjelasan misi Kota Palu 2016-2021 dapat dilihat sebagai berikut

**Tabel 3.2
Perumusan Penjelasan Misi**

No.	Pokok-pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
1	Geografi dan Demografi serta Karakter / Ciri-ciri Perkotaan	<i>Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT</i>	Pusat Data dan Informasi berbasis Geografy Information System (G I S)
		Penciptaan Sistem Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS.	
		Survey Potensi Sumber daya Kota Palu	
		Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu pada OPD dan Kelurahan	
2	Nilai - nilai Karakter Kebangsaan	Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumberdaya Manusia berlandaskan Iman dan Taqwa	Kemudahan/ perluasan Akses LAYANAN Pendidikan dan kesehatan
		Pendidikan terjangkau dan berkualitas.	
		Pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas	
		Penguatan karakter kebangsaan melalui pendidikan Agama dan Budaya	
		Peningkatan dan pengembangan lembaga pendidikan kejuruan berbasis potensi sumberdaya local	
3	Pembangunan Ekonomi Mikro	Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi	Menuju/ terwujudnya kemandirian

No.	Pokok-pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
	Berorientasi Home Industri	<p>Kerakyatan</p> <p>Peningkatan ketrampilan usaha melalui pemagangan, pendidikan dan pelatihan</p> <p>Peningkatan dan pengembangan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis home industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</p> <p>Mendorong dan meningkatkan ekonomi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan</p> <p>Mendorong investasi berbasis potensi sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</p>	ekonomi masyarakat.
4	Nilai - nilai Karakter Kebangsaan	<p>Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya</p> <p>Penataan dan Rasionalisasi Kelembagaan</p> <p>Penataan dan Rasionalisasi Tata Laksana</p> <p>Penataan dan Rasionalisasi Sumberdaya Birokrasi</p> <p>Penataan dan Rasionalisasi Program, kegiatan dan anggaran</p>	Good governance (akuntabel, transparan dan responsive)
5	Nilai - nilai Karakter Kebangsaan	<p>Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya</p> <p>Peningkatan dan pengembangan pelayanan transportasi kota</p> <p>Peningkatan dan pengembangan dekorasi kota</p> <p>Penataan dan peningkatan fungsi ruang-ruang publik kota</p> <p>Penataan manajemen kebersihan dan keindahan</p>	Pemenuhan pelayanan publik

No.	Pokok-pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
		kota Pembangunan dan pengembangan pusat-pusat wisata Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan	
6	Nilai - nilai Karakter Kebangsaan dan Religius	Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa Pembinaan, Penguatan dan Pengembangan Peran Lembaga Agama dan Lembaga Adat dalam tata kehidupan sosial Pengembangan dan peningkatan nilai-nilai kearifan lokal Penguatan dan Pengembangan lembaga Seni budaya	Menumbuh kembangkan nilai - nilai budaya yang memperkuat kohesi sosial dan lingkungan

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota

Faktor-faktor penghambat:

- o Masih belum sinkronnya perencanaan teknokratik dengan perencanaan hasil aspirasi masyarakat
- o Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan perencanaan musrenbang
- o Kurang terakomodirnya hasil usulan masyarakat dalam musrenbang
- o Belum tersedianya basis data yang valid untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan
- o Kurangnya pemahaman dalam mensinkronkan perencanaan OPD dengan dokumen RPJMD

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRW berfungsi sebagai:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.
- f. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - kebijakan dan strategi struktur ruang;
 - kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- g. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:
 - perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Kota Palu;

- pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
 - peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.
- h. Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:
- mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
 - menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
 - menyetarakan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.
- i. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi:
- membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
 - mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
 - meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
 - memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
 - menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
 - mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan

- mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:
 - perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
 - optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.
- j. Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:
 - menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Kota Palu wilayah Utara;
 - mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
 - mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
 - mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
 - mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
 - melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
 - meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.
- k. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Palu sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Kota Palu dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Koordinasi dan Kualitas Perencanaan	1. Belum optimalnya koordinasi dan implementasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda maupun oleh OPD Teknis terkait; 2. Belum optimalnya koordinasi antara Bappeda dengan Badan Pengelola Keuangan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran;
2.	Sistem pengelolaan data dan informasi	3. Belum adanya sistem pengelolaan data dan informasi yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan; 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat; 5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan.
3	Sumber daya manusia	6. Masih kurangnya SDM yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi; 7. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural serta pelaksana di lingkungan Bappeda; 8. Kebijakan Pemerintah Daerah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota.
4	Monitoring dan Evaluasi	9. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan; 10. Belum mencukupinya penganggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Palu, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Palu.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Palu.

Bappeda sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan agen utama perencanaan pembangunan daerah.

Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yang belum dijadikan acuan/pedoman bagi OPD terkait dan dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kota. Tingginya kapasitas warga Kota Palu belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, keterlibatan warga kota dalam forum konsultasi publik masih didominasi oleh warga yang secara formal merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan sasaran yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Palu 2016-2021, maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masa mendatang adalah:

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, INOVATIF,
DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

Dalam pengertian Visi Bappeda tersebut maka sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian, Bappeda secara kelembagaan harus berkualitas, sehingga segala rumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural.

Dalam kaitannya dengan kredibilitas Bappeda sebagai lembaga perencana, harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) **PARTISIPATIF** artinya merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan dan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- 2) **INOVATIF** artinya selalu ada pembaruan dan kreasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- 3) **BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI** artinya dalam semua tahapan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah memanfaatkan teknologi informasi

Penetapan Visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi perencanaan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan pemantapan lembaga perencanaan pembangunan sebagai lembaga mandiri, profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan. Pemantapan fungsi dan peran perencanaan pembangunan ke depan harus melalui upaya-upaya yang lebih cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap *stakeholder* untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan Kota Palu yang partisipatif dan inovatif;
2. Terlaksananya monitoring, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta kebijakan pelaksanaan rencana pembangunan Kota Palu;
3. Tersedianya sistem perencanaan, data, dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi.

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Sesuai dengan visi dan misi Bappeda Kota Palu tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan Kota Palu yang partisipatif dan inovatif	Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inovatif	Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentasi aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen anggaran	≥ 15 %	≥ 20 %	≥ 25 %	≥ 30 %	≥ 35%
				Tersedianya dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	1	1	1	1	1
				Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Terbentuknya Forum Koordinasi Penataan Ruang	ada	ada	ada	ada	ada
2	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja serta kebijakan pelaksanaan rencana pembangunan Kota Palu	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan	Terkendalinya Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Tersedia Dokumen evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
				Tersusunnya Dokumen perencanaan Bidang Sosial dan budaya	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
				Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencana Daerah	17 org	17 org	17 org	18 org	18 org
				Tersusunnya dokumen perencanaan ekonomi dan keuangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
				Terselenggaranya Pengembangan Wilayah Strategis cepat tumbuh di kota palu	1 dok	1 dok	-	-	-
3	Tersedianya sistem perencanaan, data, dan Informasi Pembangunan Daerah berbasis teknologi informasi	Melaksanakan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan data dan informasi berbasis teknologi informasi	Terciptanya sistem perencanaan pembangunan yang andal dengan dukungan data dan informasi berbasis teknologi informasi	Tersusunnya tahapan perencanaan yang terkelola berbasis IT	4	1	1	-	-

4.4 Strategi dan Kebijakan Bappeda

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan OPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda.

FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kota Palu

PENYUSUNAN STRATEGI

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah

agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bandung secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. *Strengths-Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strengths - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan 2. Kewenangan yang jelas dan menjadikan stuktur Bappeda lebih efektif dan efisien 3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda 4. Tuntutan stakeholders akan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan dan partisipatif 5. Kepercayaan Kepala Daerah kepada Bappeda sebagai lembaga teknis yang melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan 6. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas. 	<p>Ancaman (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan 2. Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa dan kecamatan) 3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran 4. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan OPD lain 5. Rendahnya pemahaman dan animo OPD dalam memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan
<p>Kekuatan (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai 2. Tersedianya dukungan anggaran 3. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah 4. Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD 	<p>Alternatif Strategi (S-O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan 2. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerjasama dengan OPD atau pihak lain yang terkait 3. Optimalisasi penggunaan anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan tupoksi Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah 	<p>Alternatif Strategi (S-T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pengelolaan data dan informasi berbasis komputer dengan mengintegrasikan data pokok ke dalam sistem tersebut 2. Meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa dan kecamatan) melalui penyelenggaraan Bimtek Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

<p>5. Sistem Informasi Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif mulai dibangun dan dikembangkan</p>	<p>4. Meningkatkan intensitas Sosialisasi Program Pembangunan tahun berjalan melalui berbagai media komunikasi</p> <p>5. Penguatan dan percepatan pembangunan ekonomi dan wilayah melalui peningkatkan peran masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan partisipatif</p> <p>6. Membangun sistem perencanaan on line untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan</p>	<p>3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain</p> <p>4. Mensinergikan antar dokumen perencanaan RPJP, RPJM dan RTRW</p> <p>5. Meningkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Bappeda dalam melakukan perencanaan</p>
<p>Kelemahan (W) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki keahlian dan kompetensi sebagai perencana Tidak berimbang jumlah personil dengan kapasitas gedung Belum optimalnya peran Bappeda dalam TAPD sehingga masih terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran Belum adanya dukungan sistem pengelolaan dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses perencanaan Hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian dan penelitian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perencanaan pembangunan daerah 	<p>Alternatif Strategi (W-O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan jabatan fungsional perencana melalui pengiriman pegawai bappeda untuk mengikuti diklat fungsional Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan bagi pegawai Bappeda Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan bidang perencanaan Membangun sistem pengelolaan dokumen serta data/informasi berbasis IT yang dapat mendukung proses perencanaan Memfaatkan dukungan stakeholders dan kepercayaan Kepala Daerah dalam rangka optimalisasi peran Bappeda dalam TAPD Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian dan penelitian sebagai bahan inputan bagi perencanaan pembangunan daerah 	<p>Alternatif Strategi (W-T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Membagi tugas kepada seluruh aparat Bappeda secara proporsional sesuai dengan tupoksi Membangun website untuk melakukan sosialisasi program/kegiatan pembangunan Memfaatkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk mendukung mekanisme kerja Membangun kerjasama dengan pihak terkait untuk mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian dan penelitian sebagai bahan inputan bagi perencanaan pembangunan daerah

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Palu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Palu Tahun 2016-2021, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1. di bawah ini:

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bappeda Kota Palu Tahun 2016-2021

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab
			(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.577.433.786	100%	1.290.485.500	100%	1.568.254.050	100%	1.865.535.100	100%	2.052.088.610	100%	2.257.297.471	100%	10.611.094.517	
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kegiatan administrasi Perkantoran Surat Menyurat	100%	100%	7.206.000													
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik di Bappeda Kota Palu Setiap bulan	100%	100%	41.379.000	100%	18.000.000	100%	19.800.000	100%	102.300.000	100%	112.530.000	100%	123.783.000	100%	417.792.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional setiap triwulan	100%	100%	250.453.600	100%	231.588.400	100%	254.747.240	100%	257.383.720	100%	283.122.092	100%	311.434.301	100%	1.588.729.353	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dokumen/laporan keuangan dan Aset/barang setiap tahun	100%	100%	617.963.800	100%	621.590.000	100%	683.749.000	100%	679.965.000	100%	747.961.500	100%	822.757.650	100%	4.173.986.950	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor setiap triwulan	100%	100%	5.937.500	100%	3.917.800	100%	4.309.580	100%	3.770.800	100%	4.147.880	100%	4.562.668	100%	26.646.228	
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor setiap bulan	100%	100%	76.266.100	100%	76.252.550	100%	83.877.805	100%	79.475.880	100%	87.423.468	100%	96.165.815	100%	499.461.618	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab
			(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan setiap triwulan	100%	100%	50.659.800	100%	11.806.250	100%	12.986.875	100%	20.055.750	100%	22.061.325	100%	24.267.458	100%	141.837.458	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat listrik dan Elektronik untuk penerangan kantor setiap semester	100%	100%	5.003.888	100%	273.000	100%	300.300	100%	882.750	100%	971.025	100%	1.068.128	100%	8.499.091	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	100%	100%	56.748.500	100%	111.857.500	100%	123.043.250	100%	216.031.200	100%	237.634.320	100%	261.397.752	100%	1.006.712.522	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Setiap bulan	100%	100%	6.140.000	100%	10.300.000	100%	11.330.000	100%	36.080.000	100%	39.688.000	100%	43.656.800	100%	147.194.800	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman dos Setiap triwulan	100%	100%	51.675.000	100%	40.100.000	100%	44.110.000	100%	80.190.000	100%	88.209.000	100%	97.029.900	100%	401.313.900	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas setiap tahun	100%	100%	408.000.598	100%	164.800.000	100%	330.000.000	100%	389.400.000	100%	428.340.000	100%	471.174.000	100%	2.191.714.598	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	12.250.000	100%	25.387.500	100%	39.162.500	100%	43.078.750	100%	17.935.225	100%	19.728.748	100%	157.542.723	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab
			(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor pada operasionalisasi peralatan kantor setiap triwulan	100%	100%	12.250.000	100%	25.387.500	100%	39.162.500	100%	43.078.750	100%	17.935.225	100%	19.728.748	100%	157.542.723	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100%	55.125.000		-			100%	46.800.000		-		-	100%	101.925.000	
Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya Alat Mesin / Kartu Absensi		100%	8.750.000											100%	8.750.000	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		100%	46.375.000					100%	46.800.000					100%	93.175.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	52.228.000		-					100%	78.329.350	100%	86.162.285	100%	216.719.635	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keikutsertaan ASN dalam bimbingan teknis		100%	52.228.000							100%	78.329.350	100%	86.162.285	100%	216.719.635	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	33.742.000	100%	48.725.000	100%	65.725.000	100%	72.297.500	100%	78.329.350	100%	86.162.285	100%	384.981.135	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunyalaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BAPPEDA	100%	100%	33.742.000	100%	48.725.000	100%	65.725.000	100%	72.297.500	100%	78.329.350	100%	86.162.285	100%	384.981.135	
Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data/Informasi Pembangunan Daerah	100%	100%	517.694.200		-	100%	576.230.000	100%	631.790.500	100%	694.969.550	100%	764.466.505	100%	3.185.150.755	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab
			(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan dan Pengolahan Sistem informasi Pembangunan daerah kota Palu	Tersedianya Dokumen SIPD Kota Palu	1 Dok	100%	285.603.400			100%	251.050.000	100%	276.155.000	100%	303.770.500	100%	334.147.550	100%	1.450.726.450	
Penyusunan dan Pengolahan data dan Sistem informasi Manjemen Perkotaan	Tersedianya dokumen SIMKOT Kota Palu			104.436.400												104.436.400	
Penyusunan profile daerah	Tersedianya Buku/Dokumen data dan informasi profil Kota Palu	2 DOK	100%	127.654.400											100%	127.654.400	
Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan	Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan						100%	200.180.000	100%	220.198.000	100%	242.217.800	100%	266.439.580	100%	929.035.380	
Koordinasi data dan informasi sosial dan budaya	Koordinasi data dan informasi sosial dan budaya						100%	125.000.000	100%	135.437.500	100%	148.981.250	100%	163.879.375	100%	573.298.125	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	2.859.652.800	100%	2.243.830.000	100%	2.917.046.200	100%	2.992.936.100	100%	3.292.229.710	100%	3.621.452.681	100%	17.927.147.491	
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Tertlaksananya Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik		100%	123.180.900											100%	123.180.900	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab
			(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan rancangan RPJMD	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Palu 2016-2020		100%	321.470.400											100%	321.470.400	
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD		100%	129.615.000											100%	129.615.000	
Penetapan RPJMD	Tersedianya Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Palu 2016-2020		100%	76.525.000											100%	76.525.000	
Penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya Dokumen RKPD		100%	147.637.700											100%	147.637.700	
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD		100%	234.639.700	100%	28.630.000	100%	380.210.000	100%	418.231.000	100%	460.054.100	100%	506.059.510	100%	2.027.824.310	
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				100%	74.240.000	100%	141.056.000	100%	149.116.000	100%	164.027.600	100%	180.430.360	100%	708.869.960	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	355.977.400	100%	401.952.000	100%	442.147.200	100%	414.092.800	100%	455.502.080	100%	501.052.288	100%	2.570.723.768	
Penyusunan RKUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	199.551.600											100%	199.551.600	
Penyusunan Dokumen Renja	Tersusunnya dokumen Renja Bappeda dan PM		100%	36.006.500											100%	36.006.500	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab
			(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		100%	162.113.600	100%	77.240.000	100%	154.480.000	100%	169.928.000	100%	186.920.800	100%	205.612.880	100%	956.295.280	
Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah yang Terstruktur		100%	169.005.000											100%	169.005.000	
Penyusunan Rencana Strategi SKPD (RENSTRA SKPD)	Terselenggaranya Penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA Bappeda		100%	18.930.000											100%	18.930.000	
Penyusunan Dokumen RKPDP	Tersusunnya dokumen RKPDP				100%	138.430.000	100%	152.273.000	100%	167.500.300	100%	184.250.330	100%	202.675.363	100%	845.128.993	
Pendampingan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya kegiatan pendampingan pembangunan daerah		100%	885.000.000	100%	1.110.800.000	100%	1.221.880.000	100%	1.344.068.000	100%	1.478.474.800	100%	1.626.322.280	100%	7.666.545.080	
Koordinasi Penyusunan Dan Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu	Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu				100%	260.514.000									100%	260.514.000	
Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Terkendalinya Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah				100%	57.080.000	100%	300.000.000	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	1.449.380.000	
Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan				100%	40.664.000									100%	40.664.000	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	
			(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Revisi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021				100%	54.280.000	100%	125.000.000								100%	179.280.000	
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya dokumen pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%			-	-						100%	270.000.000	100%	85.000.000	100%	355.000.000	
Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Tersosialisasikannya kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh											100%	70.000.000			100%	70.000.000	
Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Terkoordinasinya penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh													100%	85.000.000	100%	85.000.000	
Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Tersusunnya perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh											100%	200.000.000			100%	200.000.000	
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	1 Dok	100%	494.739.070	100%	69.460.000	100%	481.040.000	100%	566.487.170	100%	494.558.400		307.514.240	100%	2.413.798.880		

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	
			(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Koordinasi perencanaan penangan perumahan	Sinergitas program dan kegiatan di bidang perumahan		100%	94.842.170												100%	94.842.170	
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang air minum, drainase dan sanitasi perkotaan		100%	71.035.000					100%	187.343.170						100%	258.378.170	
Koordinasi Perencanaan Program Kota Hijau	Terlaksananya koordinasi program Kota Hijau Kota Palu		100%	241.810.000	100%	69.460.000	100%	250.000.000								100%	561.270.000	
Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan dan Perencanaan Ruang di Kota Palu		100%	87.051.900			100%	152.510.000	100%	167.761.000	100%	184.537.100	100%	202.990.810	100%	100%	794.850.810	
Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan	Terkoordinasinya penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan								100%	125.000.000						100%	125.000.000	
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan	Terkoordinasinya perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan										100%	125.000.000				100%	125.000.000	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab
			(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Terkoordinasinya penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial						100%	78.530.000	100%	86.383.000	100%	95.021.300	100%	104.523.430	100%	364.457.730	
Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	Terkoordinasinya penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan										100%	90.000.000			100%	90.000.000	
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-									100%	200.000.000			100%	200.000.000	
Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terkoordinasinya penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup										100%	200.000.000			100%	200.000.000	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah	8,78%	100%	137.756.800					100%	221.453.430	100%	190.000.000	100%	150.000.000	100%	699.210.230	
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Tersusunnya masterplan pembangunan ekonomi daerah								100%	221.453.430					100%	221.453.430	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang ekonomi										100%	90.000.000			100%	90.000.000	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab		
			(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan	Tersusunnya masterplan penanggulangan kemiskinan													100%	150.000.000	100%	150.000.000		
Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	Tersusunnya indikator dan pemetaan daerah rawan pangan													100%	100.000.000		100%	100.000.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertindakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan		100%	137.756.800										100%	-	100%	-	100%	137.756.800
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	100%	100%	1.078.688.771						100%	400.000.000	100%	100.000.000	100%	-	100%	1.578.688.771		
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya		100%	362.034.271						100%	400.000.000					100%	762.034.271		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertindakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan													100%	100.000.000		100%	100.000.000	
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu	Tertindakannya koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat		100%	716.654.500												100%	716.654.500		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencana Daerah	87 Orang								100%	60.000.000	100%	-	170.000.000	100%	230.000.000			

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab
			(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana								100%	60.000.000					100%	60.000.000	
Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Tersosialisasinya kebijakan perencanaan pembangunan daerah												100%	70.000.000	100%	70.000.000	
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Tertindakannya Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah												100%	100.000.000	100%	100.000.000	
Program Kerjasama Pembangunan	Terselenggaranya koordinasi kerjasama pembangunan	-	100%	181.520.985		-		-	100%	177.210.205	100%	126.500.000	100%	219.150.000	100%	704.381.190	
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terkoordinasinya Kerjasama Pembangunan Antar Daerah		100%	8.040.000					100%	62.210.205					100%	70.250.205	
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Terfasilitasinya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga		100%	173.480.985											100%	173.480.985	
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terkoordinasinya dalam pemecahan masalah-masalah daerah								100%	115.000.000	100%	126.500.000	100%	139.150.000	100%	380.650.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertindakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan												100%	80.000.000	100%	80.000.000	
TOTAL			100%	7.000.831.412	100%	3.677.888.000	100%	5.647.457.750	100%	7.077.588.755	100%	7.594.940.195	100%	7.766.934.215	100%	38.765.640.327	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Palu dengan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Palu harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Palu, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Akhir Tahun RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan Kota Palu yang partisipatif dan inovatif	Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inovatif	Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen anggaran		9%	≥ 15 %	≥ 20 %	≥ 25 %	≥ 30 %	≥ 35%	≥ 35%
				Tersedianya dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
				Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	66%	85%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Akhir Tahun RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
				Terbentuknya Forum Koordinasi Penataan Ruang	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja serta kebijakan pelaksanaan rencana pembangunan Kota Palu		Terkendalinya Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	11 dok
				Tersedia Dokumen evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	10 dok
				Tersusunnya Dokumen perencanaan Bidang Sosial dan budaya	3 dok		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	8 dok
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
				Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencana Daerah	87 org		17 org	17 org	17 org	18 org	18 org	174 org

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Akhir Tahun RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
				Tersusunnya dokumen perencanaan ekonomi dan keuangan			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
				Terselenggaranya Pengembangan Wilayah Strategis cepat tumbuh di kota palu	5 dok		1 dok	1 dok	-	-	-	7 dok
3	Tersedianya sistem perencanaan, data, dan Informasi Pembangunan Daerah berbasis teknologi informasi	Melaksanakan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan data dan informasi berbasis teknologi informasi	Terciptanya sistem perencanaan pembangunan yang andal dengan dukungan data dan informasi berbasis teknologi informasi	Tersusunnya tahapan perencanaan yang terkelola berbasis IT			4	1	1	-	-	6 aplikasi